

ORGANISASI *DITEMBAK PATUIH*

Oleh: Wisran Hadi

Begitu mungkin julukan yang tepat saat ini bagi LKAAM. *Kaateh* indak *bapucuaik*, karena LKAAM sudah melepaskan diri dari naungan utamanya, Golkar. *Ka bawah indak baurek*, karena LKAAM bukanlah organisasi yang membawahi KAN. Tidak ada kaum atau kemenakan yang berada di bawahnya. Di tengah-tengah *di giriak kumbang*, karena pengurus LKAAM telah membebaskan diri pula dari kepengurusan yang terdiri dari para pejabat. Semua itu karena karena LKAAM telah *ditembak patuih*. *Patuihnya* adalah reformasi.

Dalam masa-masa ke depan, LKAAM sebagai sebuah lembaga yang menghimpun para datuk benar-benar mendapat tantangan yang luar biasa berat. Dengan melepaskan diri dari Golkar, tidak lagi menjadi "perpanjangan tangan partai" dan tidak pula bergantung lagi pada pejabat dalam kepengurusannya, tentulah dapat diperkirakan kesulitan yang dihadapi. Terutama masalah dana, kemudian masalah wibawa. LKAAM harus dapat membiayai diri sendiri, tidak perlu lagi tergantung dari anggaran yang disuntikkan oleh partai atau pejabat-pejabat tertentu. Sedangkan biaya dari APBD tentulah tidak mencukupi. Sedangkan patigan *sawah* tidak mungkin diserahkan pada LKAAM. Jangan-jangan, kantor LKAAM yang sekarang, yang menempati sebuah ruangan di Gedung Abdullah Kamil akan diambil pula oleh yayasan pemiliknya. Betapa ironisnya bila hal itu terjadi. Sebagai perbandingan saja, urang *mudo* atau pemuda, dalam kategori "urang" menurut adat, adalah anak nan alun *dapek maapuih salemo* itu sudah punya gedung yang megah di kompleks GOR, sedangkan ninik mamak, datuk-datuk, yang dalam kategori adat disebut sebagai nan gadang basa *batuah* tergusur dari kantomya, karena kantor itu bukan miliknya sendiri. Yang cukup menarik terhadap LKAAM untuk masa ke depan adalah posisi organisasi ini. LKAAM bukanlah organisasi persatuan dari datuk-datuk yang tergabung dalam Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN), di mana KAN mempunyai fungsi, kedudukan yang jelas pada nagari-nagari bersangkutan. Jika kita mengikuti logika - kembali ke nagari - sebagaimana keinginan sebagian besar datuk-datuk kita, maka KAN

akan tetap berdiri sendiri-sendiri berdasarkan prinsip adatnya ; *adat salingka nagari*. Artinya, tidak ada lagi organisasi di atas KAN. Dari logika 'kembali ke nagari' itu, berarti pula, KAN akan tetap menjadi otonom. Lalu LKAAM mau dikemanakan ?

Mungkin saja beberapa datuk-datuk tetap ingin mempertahankan keberadaan LKAAM, tetapi dapatkah LKAAM dianggap lagi sebagai *mewakili ninik mamak atau penghulu seluruh nagari* di Minangkabau sebagaimana zaman Orde Baru dulu? Mana mungkin para datuk dari Luhak Nan Tuo akan mau diatasnamakan oleh datuk-datuk dari Luhak Nan Bungsu misalnya, atau sebaliknya?

Barangkali saja, LKAAM akan mengulangi posisi *pangulu kapalo* yang pernah ada di Lintau, ketika Belanda masih bercokol mengobok-obok adat dan para penghulunya. *Pangulu Kapalo* dimaksudkan Belanda sebagai penghulu yang berada di atas semua penghulu yang ada di sana. Tujuannya hanya satu - untuk kepentingan Belanda -. Dan nanti, LKAAM kah yang akan berfungsi sebagai *pangulu kapalo* bagi semua penghulu di Minangkabau? Jika hal itu memang dikehendaki oleh semua penghulu *nan gadang basa batuah itu*, lalu di mana letak federasi-federasi nagari yang selalu dibangga-banggakan itu? Bukankah semua penghulu *seakan* sepakat bahwa tidak ada raja di Minangkabau. Semua nagari berdiri sendiri-sendiri!

Banyak rentetan berikutnya yang harus dibenahi LKAAM. Persoalan awalnya tentulah dalam status "peserta" dari Mubes LKAAM itu sendiri. Benar-benarkah semua peserta Mubes LKAAM itu terdiri dari datuk-datuk yang mewakili KAN dari masing-masing nagari? Atau setiap datuk yang dikehendaki panitia Mubes? Atau datuk-datuk yang berminat saja boleh menjadi peserta Mubes ? Dan jika pengurus LKAAM nanti dipilih, kriteria apa pula yang harus ditetapkan? Mungkin sekali akan terjadi semacam **presidium**, seperti raja-raja di Malaysia yang setiap 4 tahun bergilir menjadi Yang Dipertuan Agung. Dan bagaimana pula misalnya jika seorang datuk yang jauh tinggal di Pikumbuah sana, apakah juga boleh menjadi pengurus LKAAM tingkat I ?

Lalu, apakah memang ada *datuk tingkat I dan datuk tingkat II* ?

Sudah menjadi kesepakatan para ninik mamak bahwa LKAAM tidak lagi ikut *bermain* dalam politik praktis seperti masa Orde Baru. Kalau tidak ikut, lalu LKAAM menjadi organisasi apa ? Sementara di nagari-nagari KAN sudah diperkuat kembali

fungsi dan kedudukannya dengan adanya usaha –kembali ke nagari-. Apakah pengurus LKAAM atau ketua LKAAM mau dijadikan *pangulu kapalo* seperti zaman Belanda dulu? Tentu hal itu tidak akan dapat disetujui para datuk-datuk.

Tapi, bagaimanapun LKAAM sebagai sebuah organisasi tentu masih diperlukan, setidaknya-tidaknya bagi datuk-datuk yang 'lengser' dari jabatan politik atau jabatan pemerintahan. Setidaknya-tidaknya, LKAAM akan berfungsi sebagai sebuah panguyuban. Arena untuk saling jumpa dan silaturahmi. Sedangkan bagi anak kemenakan, organisasi ini tentu tidak disegani lagi karena tidak ada lagi kekuasaan yang menumpanginya.

Pulang maklum kapado datuk-datuk nan gadang basa batuah. Selamat bermubes!

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.